

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia , yang memberikan dampak yang cukup besar pada semua aspek kehidupan. Dampak dari krisis ekonomi terlihat pada sektor privat seperti pasar modal dan sektor publik (pemerintah) seperti pemerintah daerah. Dampak yang diperoleh akibat adanya krisis lebih banyak dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan, dampak positif yang diperoleh adalah dari sektor ekspor.

Pengaruh negatif dari krisis ekonomi ini berdampak pula pada sektor Anggaran Dan Belanja Negara (APBN) yaitu menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daerah yang tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat atau Propinsi akan lebih tinggi. Hal ini dapat berarti bahwa dengan adanya krisis

ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja (pengeluaran) daerah pemerintah kabupaten/ kota. (Halim,2001)

Pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi sehingga menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat, yang kemudian berpengaruh pada terganggunya penerimaan pendapatan pemerintah kabupaten/ kota. Hal ini diperparah lagi dengan adanya undang-undang baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRB) yakni UU No 18 tahun 1997. Undang-undang ini membatasi pemungutan pajak daerah dimana daerah kabupaten/kota hanya diperbolehkan untuk memungut enam jenis pajak daerah. Dengan berkurangnya jenis pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota maka penerimaan daerah dari pajak juga berkurang pula. Sehingga pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengalami tekanan keuangan (*fiscal stress*) yang berakibat pada penyusunan anggaran yang tidak pasti.

Sebelum terjadinya *fiscal stress* tingkat kepastian anggaran tinggi, setelah terjadinya *fiscal stress* maka kepastian anggaran menjadi rendah. Kepastian anggaran yang rendah menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja. Dengan adanya *fiscal stress* ini juga akan berakibat pada kesiapan pemerintah kota/kabupaten dalam menghadapi otonomi daerah. *Fiscal stress* berakibat

pada tidak stabilnya kesiapan pemerintah kabupaten/kota terutama pada segi keuangan. Kinerja keuangan merupakan salah satu tolok ukur dari kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

1.2.POKOK MASALAH

- 1.Apakah *fiscal stress* mempengaruhi kinerja keuangan daerah?
- 2.Apakah terjadi perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah pada waktu sebelum *fiscal stress* dan saat *fiscal stress* ?
- 3.Apakah *fiscal stress* mempengaruhi kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah?

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *fiscal stress* pada kinerja keuangan daerah. Selain itu juga untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan kinerja keuangan daerah yang signifikan sebelum dan saat terjadinya *fiscal stress*, sehingga akan diketahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Mengetahui kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah apakah semakin rendah pada saat terjadinya *fiscal stress*.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan daerah pada saat sebelum

dan saat terjadinya *fiscal stress*. Peningkatan dan penurunan kinerja keuangan daerah sangat mempengaruhi kesiapan daerah tersebut dalam menghadapi otonomi daerah. Sehingga penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah untuk memberlakukan otonomi daerah.

1.5. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis 1 : Kinerja keuangan suatu daerah dalam bentuk pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*

Hipotesis 2 : Kinerja keuangan suatu daerah dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*.

Hipotesis 3 : Kinerja keuangan dalam bentuk Kinerja keuangan daerah dalam bentuk ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*

Hipotesis 4 : Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota lebih tinggi sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*.

1.6.METODE PENELITIAN

a.Sampel Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Barat. Data tentang Realisasi APBD pemerintah Kabupaten se-Jawa Barat sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan sebelum dan saat terjadinya *fiscal stress* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Periode penelitian adalah dua tahun sebelum terjadinya krisis ekonomi yaitu 1995/1996, 1996/1997 dan dua tahun saat terjadinya krisis yaitu 1998/1999,1999/2000. Periode anggaran 1997/1998 tidak dimasukkan dalam sampel penelitian karena periode tersebut terjadi krisis ekonomi.

b.Variable penelitian

Variable penelitian yang diukur dalam penelitian, yang akan digunakan untuk menilai kinerja keuangan kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1.Tingkat kemandirian pembiayaan

Mengukur tingkat kemandirian pemerintah kabupaten dalam membiayai APBD setiap periode anggaran. Kemandirian pembiayaan daerah diukur dengan 2 kriteria Kuncoro yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

$$\text{Kemampuan pembiayaan} = \frac{\text{Rasio Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah belanja rutin non pegawai}}$$

$$\text{Kemampuan mobilisasi} = \frac{\text{Rasio Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli daerah}}$$

2. Tingkat Ketergantungan

Mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya(PAD). Alat analisis yang digunakan adalah analisis derajat otonomi fiskal, yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya(PAD). Rasio yang digunakan untuk menghitung derajat otonomi fiskal adalah administrasi independency ratio yaitu

$$\text{Administrasi Independency Ratio} = \frac{\text{Ratio Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Penerimaan APBD tanpa subsidi}}$$

3. Desentralisasi Fiskal

Menunjukkan tingkat wewenang dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat pada daerah yaitu kabupaten untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini berarti pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional ,sehingga tanggung jawab semua kegiatan ada ditangan pemerintah kabupaten.

$$\text{Tingkat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan daerah}}$$

1.7. ANALISIS DATA

Data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis normalitas, untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Analisis normalitas ini diperlukan sebagai prasyarat uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (*Paired Sample T Test*) Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini digunakan uji non parametrik yaitu *Kolmogorov Sminov*

Untuk menguji seluruh hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan uji statistik parametrik dan non parametrik.. Jika data yang diperoleh data normal maka menggunakan pengujian parametrik uji T untuk dua sampel yang berpasangan (*Paired Sample T TEST*) dan jika data tidak normal maka menggunakan pengujian non parametrik *Wilcoxon Sign Ranks Test* sebagai alat uji statistik pendamping untuk memperkuat analisis.

1.8. SISTEMATIKA PENELITIAN

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas dari latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang pengertian keuangan daerah, komponen keuangan daerah, pengertian *fiscal stress*, penyebab terjadinya *fiscal stress*, dampak *fiscal stress* terhadap keuangan daerah, dampak diberlakukannya UU No 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Membahas pengertian otonomi daerah, desentralisasi fiskal. Membahas tentang persiapan yang perlu dilakukan suatu daerah untuk menghadapi otonomi daerah

BAB III : DATA PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang Kabupaten yang ada di Jawa Barat, sumber-sumber penerimaan pendapatan, kondisi keuangan daerah serta komponen-komponen yang membentuk keuangan daerah.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini terdiri dari perhitungan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten dalam membiayai APBD. Pengukuran tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penentuan tingkat

desentralisasi fiskal kabupaten.menggunakan uji statistik uji beda dua sample.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini akan menyampaikan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya serta saran bagi pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Keuangan Daerah

2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah yaitu semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah:1995)

Pengertian hak pada penjelasan diatas adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum dan pengembangan ekonomi.

2.1.2. Komponen Keuangan Daerah

2.1.2.1. Penerimaan Daerah

Keuangan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah yang tersusun dalam Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD). Komponen yang ada dalam penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah yaitu:

a. Hasil pajak daerah.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Rochmad Sumitro, 1980). Sedangkan pajak daerah yaitu pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. (Josef Riwu Kaho, 1997)

Ciri-ciri pajak daerah yaitu:

1. Pajak Daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

b. Hasil retribusi daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pungutan jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau aneka jasa yang diberikan oleh daerah. (Josef Riwo Kaho, 1997)

Ciri-ciri retribusi daerah:

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk

menambah penghasilan daerah (UU No 5/1974). Sifat perusahaan daerah yaitu:

1. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
 - a. Memberi jasa.
 - b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
 - c. Memupuk pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.
- d. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain yang sah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang digunakan oleh daerah untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil(DBH)

Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Pemerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

serta penerimaan dari sumberdaya alam. Penerimaan Negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbangan 10 % untuk pemerintah pusat, dan 90 % untuk daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah propinsi.
- b. 64,8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota
- c. 9 % untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening kas Negara dan kas daerah

Penerimaan Negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah propinsi.
- b. 64 % untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

Penerimaan Negara dari sumberdaya alam yang meliputi sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum(DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adanya dana alokasi umum memberikan jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan dana alokasi umum ini merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD.

3. Dana Alokasi Khusus(DAK).

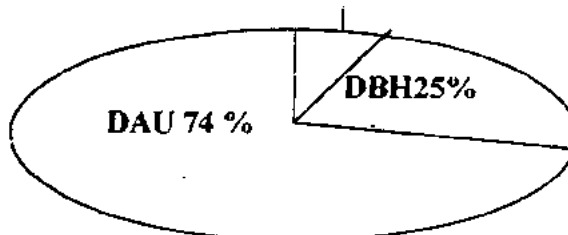
Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAU bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Besarnya DAU setiap tahunnya tidak dapat ditentukan besarnya karena pengalokasiannya tergantung pada ketersediaan dana yang ada dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus yaitu

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan

kebutuhan daerah lain. Contoh kebutuhan dikawasan transmigrasi, dan pembangunan jalan di kawasan terpencil.

- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Gambar 2.1
Proporsi Dana Perimbangan
DAK 1%



Sumber : APBN 2001

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang berasal dari pihak lain. Pinjaman daerah digunakan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pinjaman daerah juga bisa digunakan untuk membiayai harta lain yang bisa meningkatkan penerimaan daerah sehingga penerimaan tersebut bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.. Pinjaman daerah bisa berasal dari luarnegri maupun dari dalam negeri.

4. Jenis penerimaan lain.

Jenis penerimaan lain yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain, bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah

5. Lain-lain penerimaan yang sah.

Lain-lain penerimaan yang sah seperti hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

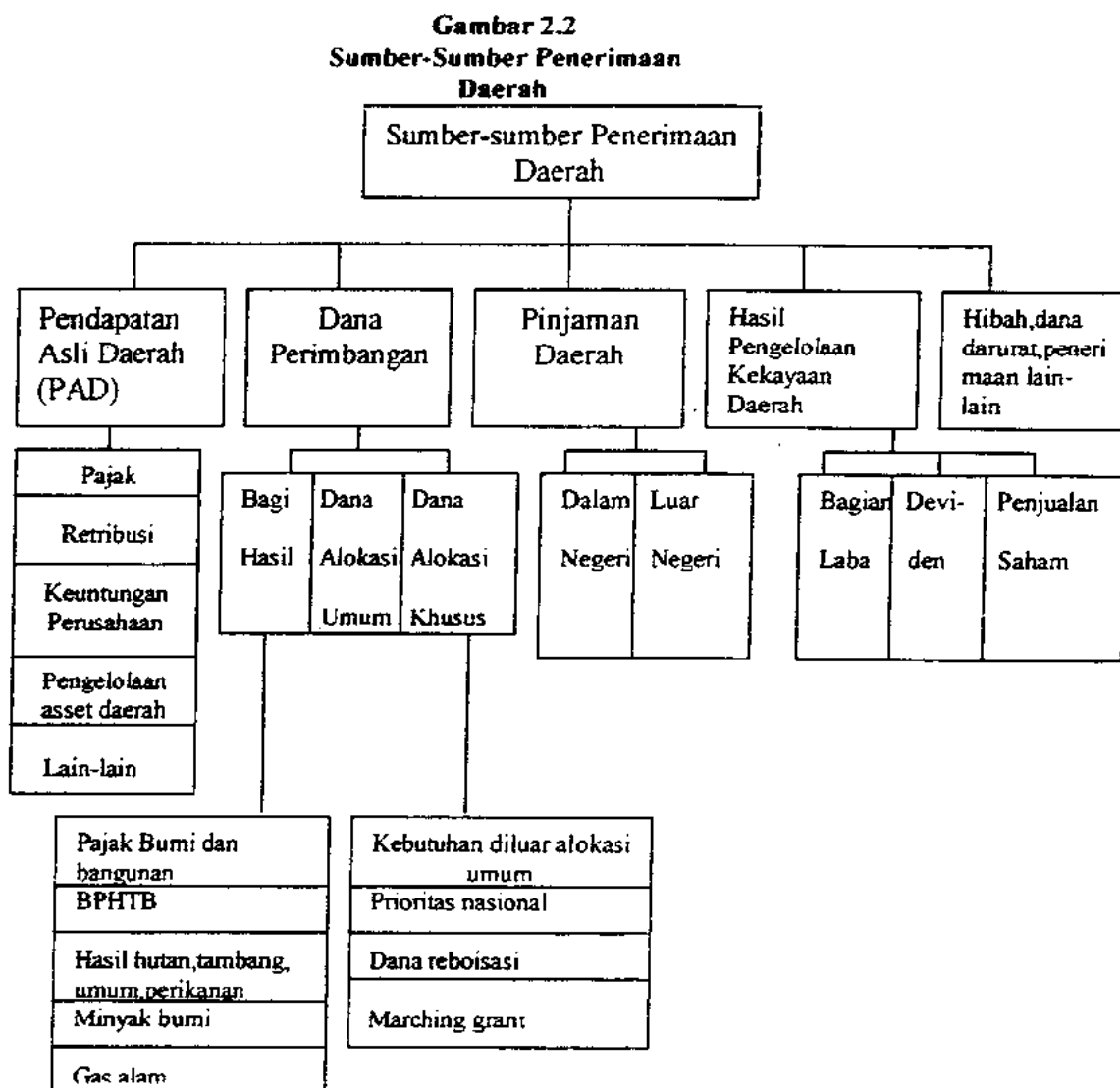
Dalam suatu daerah biasanya komponen yang paling besar sumbangannya terhadap penerimaan suatu daerah adalah pajak, selain penerimaan daerah yang berasal dari pengolahan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Adanya krisis ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan atau penerimaan penduduk, memberikan pengaruh juga pada penerimaan daerah khususnya pada sektor pajak, dimana kemampuan penduduk untuk membayar pajak juga berkurang sehingga penerimaan daerah berkurang juga. Berkurangnya penerimaan daerah menyebabkan *fiscal stress* dimana pengeluaran daerah menjadi tidak pasti.

Pajak merupakan komponen yang utama dalam Pendapatan Asli Daerah. Sumbangan terbesar diberikan pajak pada PAD. Pajak yang masuk dalam PAD adalah pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Naik turunnya pendapatan yang diperoleh masyarakat akan sangat mempengaruhi pajak yang dibayarkan masyarakat, sehingga pendapatan asli daerah juga akan terpengaruh. Jika PAD suatu daerah tidak mampu membiayai pengeluarannya maka

dana lain diperoleh dari sumbangan pemerintah atau pihak swasta dan pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Berikut adalah bagan sumber-sumber penerimaan daerah:



Sumber:

UU 25/99 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

2.1.2.2. Pengeluaran Daerah

Krisis ekonomi menyebabkan tekanan kondisi keuangan atau *fiscal stress* dimana penerimaan daerah menurun sedangkan pengeluaran daerah tetap atau bahkan meningkat pada pengeluaran yang terpengaruh langsung dengan laju inflasi.

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi, dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Berdasarkan struktur anggaran daerah tersebut, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka. (Abdul Halim, 200;hal 220).

Belanja aparatur daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Contohnya adalah belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal pembangunan.

Belanja pelayanan publik digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Contohnya berupa belanja administrasi umum, belanja operasi, serta belanja modal/pembangunan.

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan (pengeluaran transfer), merupakan pengeluaran uang yang bersifat tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, tidak mengharapkan hasil pendapatan seperti layaknya investasi.

Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kejadian-kejadian luar biasa, seperti bencana alam, utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan untuk pengembalian penerimaan yang bukan menjadi haknya.

2.1.3. Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah merupakan salah satu wujud persiapan pemerintah daerah dalam menghadapi globalisasi perekonomian

dan pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan daerah sebelum reformasi adalah sebagai berikut :

- 1). Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggung jawaban kepala daerah (PP No.6 Tahun 1975 Pasal 13 ayat (1)).
- 2). Bentuk laporan perhitungan APBD, terdiri atas: perhitungan APBD, nota penjualan, perhitungan kas dari pencocokan antara sisa kas dan sisa perhitungan dilengkapi dengan lampiran ringkasan perhitungan pendapatan dan belanja (PP No.6 Tahun 1975 dan Kep Mendagri No.3 Tahun 1999).
- 3). Pinjaman, baik pinjaman Pemda maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah.
- 4). Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah (kepala daerah dan DPRD).
- 5). Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup; perbandingan antara anggaran dan realisasinya, perbandingan antara biaya dengan realisasinya, target dan fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran perhitungan APBD (PP No.6 Tahun 1975).
- 6). Laporan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan perhitungan APBD baik yang dibahas atau tidak dibahas, tidak mengandung konsekuensi terhadap jabatan kepala daerah.

Dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah yang berupa reformasi anggaran.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value of money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh DPRD kepada masyarakat. *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang termurah. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat (*public money*) dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas yaitu penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan public (Mardiasmo : 2002). Ciri pengelolaan keuangan daerah pada era reformasi adalah :

- 1) Perhitungan APBD menjadi sama pertanggungjawaban kepala daerah (PP No.108 Tahun 2000 Pasal 5).
- 2) Bentuk laporan pertanggungjawaban terdiri atas: laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, neraca daerah. (PP No.105 Tahun 2000 Pasal 38).

- 3) Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (sebagai hak pemerintah daerah), tetapi masuk sebagai pos penerimaan (belum tentu sebagai hak pemerintah daerah).
- 4) APBD disusun oleh kepala daerah, DPRD beserta rakyat.
- 5) Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup perbandingan antara anggaran dan realisasinya, perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya, target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
- 6) Laporan pertanggungjawaban kepala daerah mempunyai konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.

Adanya reformasi anggaran bertujuan agar terdapat perubahan paradigma anggaran daerah yang berupa:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- 2 . Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
- 3 . Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- 4 . Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran ataupun pendapatan.
- 5 . Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

6 . Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Anggaran merupakan alat untuk merencanakan pengeluaran dan pendapatan di masa yang akan datang. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) atas persetujuan DPRD.

Pengeluaran anggaran daerah harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Pengeluaran anggaran untuk pengeluaran pembangunan untuk memenuhi kebutuhan umum/publik. Diharapkan pengeluaran yang dilakukan dapat tepat pada sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan daerah untuk mencegah adanya pemborosan.

2.1.4. Kinerja Keuangan Daerah

2.1.4.1. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Daerah

Pengawasan disini berarti monitoring yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif (dalam hal ini DPRD dan masyarakat) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Pengendalian merupakan internal control yang berada dibawah kendali eksekutif (dalam hal ini pemerintah daerah) untuk menjamin bahwa strategi dilaksanakan secara baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pemeriksaan(audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan

independensi untuk mengukur apakah kinerja yang telah dicapai eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Objek yang diperiksa adalah kinerja anggaran, anggaran kinerja, dan laporan pertanggung jawaban yang terdiri atas nota perhitungan APBD, neraca, laporan aliran kas, dan laporan surplus/defisit anggaran.

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, dalam pengelolaan keuangan daerah maka perlu pengawasan dan pengendalian yang dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi masyarakat di daerah. Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan internal auditor pemerintah daerah (misalnya inspektorat). Fungsi pemeriksaan diserahkan kepada lembaga pemeriksaan yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, misalnya BPK, BPKP, atau akuntan publik independen. Jika DPRD menghendaki, dewan dapat meminta BPK atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya lembaga publik.

2.1.4.2. Variabel Penilaian Kinerja keuangan Daerah

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikembangkan Standar Analisa Biaya (SAB), tolok ukur kinerja, dan standar

biaya. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut: (Mardiasmo, 2002: 220)

1. Sistem perencanaan dan pengendalian.

Sistem ini meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi, dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung jawab.

2. Spesifikasi teknis dan standardisasi.

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme.

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi, maka diperlukan personel yang mempunyai kompetensi teknis dan profesionalisme dalam bekerja.

4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward & punishmen*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*.

5. Mekanisme sumber daya manusia.

Pemerintah Daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki personal dan organisasi.

Variabel-variabel penelitian yang digunakan sebagai dasar ukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian pembiayaan.

Ukuran ini digunakan untuk menguji tingkat kekuatan kemandirian pemerintah Kabupaten/ Kota dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap periode anggaran. Tingkat kemandirian pembiayaan daerah diukur dengan 2 kriteria, yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah. Menurut ukuran Kuncoro (1995) tingkat kemandirian pembiayaan daerah diukur dengan 2 kriteria, yaitu kemampuan dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah.

Kemampuan daerah dalam pembiayaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Belanja Rutin Non Pegawai (BRNP) atau jika diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Pembiayaan} = \frac{\text{PAD}}{\text{BRNP}}$$

Kemampuan mobilisasi daerah ditentukan dengan ukuran Rasio Pajak Daerah (PD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), atau jika diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Mobilisasi Daerah} = \frac{\text{PD}}{\text{PAD}}$$

Adanya krisis ekonomi dan UU No 18 Tahun 1997 menyebabkan tekanan kondisi keuangan (*fiscal stress*). *Fiscal stress* ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang kemudian juga akan berpengaruh pada tingkat kemandirian suatu kabupaten/kota. Penelitian yang berkenaan dengan pengukuran tingkat kemandirian pembiayaan daerah sebelum tekanan keuangan (*fiscal stress*) yang dilakukan oleh Izzah Marfuah (2000) dengan menggunakan tahun anggaran 1984 sampai dengan tahun 1997 pada kabupaten Kutai di Propinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pembiayaan kabupaten/kota relatif lebih tinggi sebelum *fiscal stress*. Penelitian yang sama dilakukan oleh Bambang Hariyadi pada kabupaten/kota yang ada di propinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 1995 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian biaya yang meliputi tingkat pembiayaan dan tingkat mobilisasi daerah menunjukkan hasil, bahwa tingkat kemampuan pembiayaan sebelum tekanan keuangan (*fiscal stress*) lebih besar dari pada saat *fiscal stress*, sedangkan untuk kemampuan mobilisasi daerah menunjukkan hasil lebih rendah sebelum *fiscal stress* dari pada saat *fiscal stress*. Sehingga dapat dikemukakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa :

H1 : Kinerja keuangan dalam bentuk pembiayaan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*.

H2 : Kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemampuan mobilisasi pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*.

2. Tingkat Ketergantungan.

Variabel ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Alat analisis yang digunakan adalah analisis derajat otonomi fiskal. Derajat otonomi fiskal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio yang digunakan untuk menghitung derajat otonomi fiskal ini diukur dengan *administrasi independency ratio*, yaitu rasio antara PAD dengan Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi (TPDTS).

$$\text{Derajat Otonomi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPDTS}}$$

Penelitian mengenai tingkat ketergantungan yang diukur menggunakan derajat otonomi fiskal yang dilakukan oleh Izzah Marfuah pada Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 1984 sampai 1997 menunjukkan hasil bahwa tingkat ketergantungan kabupaten Kutai relatif besar. Penelitian yang sama yang dilakukan oleh Bambang Hariyadi pada kabupaten/kota di

Propinsi Jawa Timur pada tahun 1995 sampai 2000 menunjukkan hasil jika tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat lebih besar sebelum *fiscal stress* daripada saat *fiscal stress*. Sehingga dapat dikemukakan hipotesis yang menyatakan bahwa:

H₃ : Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*

3. Desentralisasi Fiskal.

Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah yaitu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan. Ini berarti bahwa pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional, sehingga seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan salah satu rasio yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) atau:

$$\text{Tingkat Desentralisasi Fiskal} : \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}}$$

Penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat desentralisasi fiskal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Elfi Ekawati pada daerah tingkat

II di propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan relatif masih rendah dibandingkan dengan desentralisasi fiskal daerah tingkat II di Indonesia. Penelitian yang sama dilakukan oleh Arik Anik Sulistiyorini untuk kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah untuk periode 1995 sampai 2000 menunjukkan hasil bahwa sebelum *fiscal stress* tingkat desentralisasi fiskal berbeda daripada saat *fiscal stress*, lebih tinggi sebelum *fiscal stress* daripada saat *fiscal stress*. Sehingga dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H4 : “ Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat desentralisasi fiskal sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*”.

2.2. Pengertian dan Dampak *Fiscall Stress*

Fiscall stress merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi yang menimpa Indonesia yang berupa tekanan kondisi keuangan.. *Fiscall stress* atau tekanan kondisi keuangan menyebabkan ketidakpastian anggaran dari pemerintah baik anggaran penerimaan maupun anggaran pengeluaran. Kenyataan yang terjadi pada sektor pemerintahan di Indonesia sebagai dampak dari *fiscal stress* didukung oleh teori yang dikemukakan oleh *Spicer* dan *Bingham* yaitu “Ketika perubahan faktor-faktor ekonomi, demografi dan politik membatasi pertumbuhan pendapatan, maka tingkat defisit yang terjadi menjadi makin lebih sulit dan tekanan keuangan mungkin akan terjadi”. Defisist disini

berarti bahwa permintaan untuk jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada.

Selain anggaran yang tidak pasti dampak dari *fiscal stress* adalah mempengaruhi kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Dimana jika suatu daerah hendak melaksanakan otonomi daerah maka kondisi keuangan daerah tersebut harus stabil. Karena dengan kondisi keuangan yang stabil akan lebih menjamin daerah tersebut dapat membiayai daerahnya sendiri dan sukses dalam melaksanakan otonomi daerah bagi daerahnya.

Anggaran yang pasti sangat diperlukan dalam menghadapi otonomi daerah karena anggaran daerah memiliki fungsi yang penting yaitu :

- 1) Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk: merumuskan tujuan, sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk merencanakan program, merencanakan alternatif sumber pembiayaan, mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- 2) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk: mengendalikan efisiensi pengeluaran, membatasi kekuasaan dan kewenangan Pemda, mencegah adanya *overspending*, *Underspending* dan *mis appropriation* dalam pengalokasian anggaran yang bukan

merupakan prioritas dan memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program.

- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4) Anggaran sebagai alat politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Maka penyusunan anggaran membutuhkan *political skill, coalition building*, keahlian bernegara dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik, sebab kegagalan pelaksanaan anggaran dapat menurunkan kredibilitas dan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif.
- 5) Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi penda dalam proses penyusunan anggaran.
- 6) Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja, yang akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.
- 7) Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian tugas. Pengendalian tugas merupakan *transaction-oriented* yang melibatkan kinerja tugas individual menurut aturan yang telah dibuat, sehingga dapat memotivasi pegawai penda agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja.
- 8) Anggaran dapat digunakan untuk menciptakan ruang publik (*public sphere*), sehingga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan anggaran.

2.3.Dampak Berlakunya UU No 18/1997 (Disesuaikan dalam UU No 34 Tahun 2000)

Undang-undang No 18/1997 berisi tentang pajak dan retribusi daerah yang kemudian diadakan penyesuaian dalam Undang-undang No 34 Tahun 2000. Disini diatur tentang pajak dan retribusi yang boleh diambil oleh daerah tingkat I maupun daerah tingkat II. Pemerintah kabupaten/kota hanya bisa memungut enam jenis pajak , hal ini menyebabkan jumlah penerimaan daerah menjadi berkurang. Pajak yang bisa dipungut oleh kabupaten/kota yaitu

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- g. Pajak parkir.

Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk pajak diatur dalam PP No 65 tahun 2001 dan retribusi dala PP No 66 tahun 2001. Jenis pajak daerah bisa ditetapkan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- I. Bersifat pajak bukan retribusi.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan memiliki mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan

Untuk jenis retribusi yang boleh diambil oleh daerah diatur oleh peraturan daerah. Secara garis besar jenis retribusi yang bisa dipungut oleh daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

2.4. Pengertian Otonomi Daerah Dan Desentralisasi *Fiscal*

2.4.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah yaitu wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2002).

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketetapan MPR No XV/MPR/1998 penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan adil dan serta perimbangan pembagian hasil antara pusat dan daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya di era otonomi daerah didasarkan atas asas-asas yang berlandaskan hukum, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang antara satu instansi dengan instansi lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada tiga asas yaitu :

a. Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah tersebut. Sehingga prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya.

Demikian pula perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.

b. Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Di dalam asas dekonsentrasi tanggung jawab tetap pada pemerintah pusat. Baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah terutama instansi-instansi vertikal, dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selalu perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

Menurut PP No. 39 Tahun 2001 pertimbangan dan peran asas dekonsentrasi adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada kepentingan umum.
2. Terpeliharanya komunikasi social kemasyarakatan dan social budaya dalam sistem administrasi negara.
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya keutuhan NKRI

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Penerapan otonomi daerah melalui UU No 22 tahun 1999 memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari penerapan otonomi daerah adalah adanya harapan kemakmuran dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Kerugiannya adalah bahaya yang mungkin timbul karena konflik antar kabupaten/kota dengan propinsi atau antar antar pusat dengan daerah. Hal ini mungkin terjadi jika pemahaman yang kurang atas pengertian otonomi daerah oleh penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah secara terus menerus, sehingga menimbulkan kesan hanya wewenang kabupaten/kota sehingga peran propinsi diabaikan, padahal peran propinsi sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan pendistribusian kewenangan pusat kepada daerah. Untuk menghindari bahaya tersebut maka perlu dikembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.4.2. Titik Berat Otonomi Daerah

Sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Tingkat II lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat.
- b. Dari segi manajemen penanganan pemerintah di daerah tingkat II secara holistik lebih efisien dan efektif.
- c. Hubungan eksekutif dan badan perwakilan lebih efektif dan berakar pada masyarakat setempat, sehingga tercipta arus demokrasi dalam mendukung jalannya penyelenggara pemerintahan.
- d. Lebih mengenal kebutuhan daerah dan mengembangkan potensi daerah.
- e. Lebih mudah mengadakan evaluasi terhadap keberhasilan dan kelemahan.
- f. Jalannya proses manajemen pemerintahan dan pembangunan relatif lebih cepat dan pengambilan keputusanpun akan lebih cepat

Dengan adanya titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten diharapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Tingkat I menyerahkan lebih banyak urusan pada Daerah Tingkat II. Urusan yang diserahkan harus memiliki kualitas urusan, dimana urusan yang diserahkan tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya tetapi juga oleh luas wewenang atau jenis kegiatan yang ada dalam urusan tersebut. Titik berat otonomi daerah tidak hanya dilihat dari segi kuantitatif tapi juga dari segi kualitatif urusan yang diserahkan

2.4.3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Agar pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tujuan diselenggarakannya, maka dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah di daerah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi, dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin, hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah baik sebagai fungsi legislative, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- g. Pelaksanaan asas dekosentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah dengan pemerintah pusat. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin tinggi tingkat otonomi keuangan daerah. (Insukindro,1994). Otonomi *fiscal* daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain. Namun demikian harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal di Indonesia secara rata-rata masih rendah. (Radianto,1997).

2.4.4. Faktor-Faktor Pendukung Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan daerah tersebut memiliki sumber keuangan yang efektif di satu pihak dan bantuan dari pemerintah di pihak lain.

Menurut Josef Riwu Kaho faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

1. Manusia pelaksananya harus baik.

Manusia merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Sehingga agar mekanisme pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia pelakunya harus baik pula.

2. Keuangan harus cukup baik.

Hampir semua kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya sehingga faktor keuangan sangat penting. Menurut J Wajong yang mengutip pendapat D' Audiffert menyatakan:

- a. Pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada penduduk daerah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh untuk melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu.

- b. Kepandaiaan mengendalikan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan pada melindungi dan memperbesar harta daerah, dimana semua kepentingan masyarakat satu daerah saling erat berhubungan.
- c. Anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan pada DPR haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan kemuka yang bijaksana.

3. Peralatan harus cukup baik.

Peralatan yang baik adalah peralatan yang mendukung kelancaran kerja pemerintahan daerah, peralatan yang praktis, efisien dan efektif. Peralatan disini seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, dan kendaraan dan peralatan lain yang mendukung kerja pemerintahan daerah.

4. Organisasi dan manajemen yang baik.

Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam artian struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap

pejabat, kekuasaan, tugasnya, dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang baik bisa terlaksana jika didukung oleh organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula, serta peralatan yang mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) suatu pemerintahan yang baik adalah memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. *Rule of Law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepan.

2.4.5. Desentralisasi Fiscal

Desentralisasi fiscal yaitu kewenangan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, dimana seluruh pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Daerah bebas untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Menurut Josef Riwu Kaho suatu daerah disebut sebagai daerah otonom jika memiliki atribut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah yang merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat pada daerah.
2. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diselenggarakan atas inisiatif dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur

pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.

4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup baik bagi daerah, agar membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Agar otonomi daerah berjalan dengan baik maka diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional. Hal ini dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pusat dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah.

Kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah dengan dilihat bagaimana daerah tersebut membiayai belanja daerahnya. Penghasilan Asli Daerah digunakan sebagai tolak ukur kesiapan suatu daerah untuk menghadapi otonomi daerah. Besar kecilnya peran PAD dalam membiayai anggaran daerah sangat mempengaruhi kesiapan daerah dalam menghadapi otonomi daerah. Semakin tinggi peran PAD dalam membiayai pengeluaran suatu daerah maka tingkat kesiapan daerah dalam menghadapi otonomi daerah

juga akan semakin baik atau lebih siap. Karena dalam otonomi daerah suatu daerah lebih dituntut untuk mampu membiayai daerahnya secara lebih mandiri.

Posisi keuangan suatu daerah sangat penting dalam menghadapi otonomi daerah sehingga agar suatu daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri maka perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Namun mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah wajib untuk menggali segala sumber keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu daerah harus lebih mampu menggali dan mengelola sumberdaya yang ada dalam daerahnya. Sumberdaya baik alam maupun manusia yang dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan bagi daerah. Pendapatan yang meningkat bagi daerah dengan dikelolanya sumberdaya yang ada, akan meningkatkan PAD daerah tersebut, dan meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dasar dari penelitian ini adalah perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya. Reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan dampak pada sisi kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan yang ada. Reformasi pada sistem pemerintahan dengan dikeluarkannya UU No. 22 dan 25 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri (otonomi). Untuk mencapai daerah otonom dimana tidak ada intervensi Pemerintah Pusat, sehingga daerah harus mempersiapkan diri baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Keuangan, sarana dan prasarana.

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan saat *fiscal stress* dalam rangka menghadapi otonomi daerah. Daerah penelitian yang dipilih adalah kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Barat. Sektor keuangan (*finance/fiskal*) dipilih karena beberapa kalangan menganggap sektor keuangan adalah salah satu aspek yang sangat penting apabila hendak menjalankan suatu organisasi, baik sektor privat ataupun publik, agar tetap bertahan dan dapat mencapai tujuan organisasi (*Jones &*

Pendlebury, 1996:120). Menurut Pamudji yang dikutip dari Kaho (1997:124) mengatakan bahwa keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri, kemampuan daerah yang dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan guna membiayai kebutuhannya tanpa harus menggantungkan diri pada pusat.

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD sebagai wakil rakyat.

3. 2. DATA DAN SUMBER DATA PENELITIAN

Data penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa data tentang realisasi APBD kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat. Data penelitian ini berupa data realisasi APBD kabupaten/kota yang terdiri dari kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak, kabupaten Bogor, kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, kabupaten Bandung, kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, kabupaten Kuningan, kabupaten Cirebon, kabupaten Majalengka, kabupaten Subang, kabupaten Sumedang, kabupaten Indramayu, kabupaten Purwakarta, kabupaten Karawang, kabupaten Bekasi, kabupaten Tangerang, kabupaten Serang, kotamadya Bogor, kotamadya Sukabumi, kotamadya

Bandung, kotamadya Cirebon, kotamadya Tangerang, kotamadya Bekasi untuk periode 1995 – 2000, kecuali data periode 1997 tidak digunakan karena pada periode tersebut krisis ekonomi terjadi dan UU No 18 tahun 1997 baru dilaksanakan pada tahun 1998. Untuk kotamadya Bekasi data yang tersedia hanya untuk tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000. Data ini merupakan pelaksanaan anggaran kabupaten/kota yang merupakan laporan keuangan dari sektor pemerintah daerah (publik). Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, total pendapatan daerah, total penerimaan APBD tanpa subsidi, dan belanja rutin non pegawai.

3.3. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini berjudul “ Perbedaan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Saat *Fiscal Stress* Dalam Menghadapi Otonomi Daerah”. Pengertian kinerja keuangan daerah yang tertera pada judul penelitian adalah:

“Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah”.

Sedangkan pengertian *fiscal stress* dan otonomi daerah adalah :

“*Fiscal stress* adalah tekanan kondisi keuangan akibat dari adanya krisis ekonomi, yang menyebabkan ketidakpastian anggaran pemerintah baik anggaran penerimaan maupun anggaran pengeluaran”.

“Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga pengertian kinerja keuangan daerah sebelum dan saat *fiscal stress* adalah kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sebelum dan saat terjadinya krisis. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan tekanan kondisi keuangan pada pemerintah daerah, dimana terjadi ketidakstabilan anggaran, sehingga akan mempengaruhi kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

3. 4. VARIABEL PENELITIAN

Variable penelitian yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, kemandirian keuangan pemerintah daerah menggunakan 3 pendekatan yaitu :

1. Tingkat kemandirian pembiayaan
2. Tingkat ketergantungan.
3. Desentralisasi fiskal.

3.4.1. Tingkat Kemandirian Pembiayaan.

Merupakan ukuran untuk menguji tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap periode anggaran. Diukur dengan menggunakan 2

kriteria menurut ukuran Kuncoro yaitu kemampuan daerah dalam pembiayaan dan kemampuan mobilisasi daerah .

a. Kemampuan daerah dalam pembiayaan

Kemampuan daerah dalam pembiayaan, dalam penelitian ini diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah belanja rutin non pegawai atau jika diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan pembiayaan} = \frac{\text{Rasio Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah belanja rutin non pegawai}}$$

b. Kemampuan mobilisasi daerah

Kemampuan mobilisasi daerah ditentukan dengan menghitung rasio yaitu rasio pajak daerah terhadap rasio Pendapatan Asli Daerah, atau jika diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan mobilisasi} = \frac{\text{Rasio Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli daerah}}$$

3.4.2. Tingkat ketergantungan

Mengukur tingkat kemampuan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Diukur dengan menggunakan derajat otonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD nya. Derajat otonomi fiskal dihitung dengan mengukur rasio antara

PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi, atau jika diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Administrasi Independency Ratio} = \frac{\text{Ratio Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Penerimaan APBD tanpa subsidi}}$$

3.4.3. Desentralisasi Fiskal

Mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, hal ini berarti pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan salah satu rasio, yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Atau jika diformulasikan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan daerah}}$$

3. 5. METODE ANALISIS DATA

Model analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara analisis empiris. Langkah-langkah dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Menghitung variabel-variabel penelitian per tahunnya, dengan formula yang telah ditetapkan.
2. Variabel penelitian yang telah dihitung rasionya, selanjutnya dipisahkan menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum *fiscal stress* dan periode setelah *fiscal stress*. Periode sebelum *fiscal stress* diwakili oleh data realisasi tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 sedangkan periode saat *fiscal stress* diwakili oleh data realisasi tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000.
3. Untuk mengolah data yang ada pada penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS 10.0 for Windows. Metode statistik yang digunakan sebagai alat bantu analisis adalah menggunakan metode statistik non parametrik dan parametrik. Langkah awal untuk menentukan alat statistik apa yang akan digunakan, dilakukan pengujian normalitas distribusi untuk masing masing variabel, menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*. Setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data, dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka selanjutnya dengan data data tersebut bisa dilakukan inferensi dengan metode statistik Parametrik, yaitu dengan uji beda untuk dua sampel yang berpasangan (*Paired Sample T Test*). Namun jika terbukti distribusi data tidak normal atau jauh dari kriteria distribusi data tidak normal, maka digunakan metode statistik non parametrik, yaitu uji data dua sampel berhubungan (Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon).

4. Untuk memperkuat analisis perhitungan dilakukan dengan dua cara yaitu periode dua tahun sebelum dan saat *fiscal stress* dan periode satu tahun sebelum dan saat *fiscal stress*.

BAB IV

ANALISA DATA

4.1. DESKRIPSI DATA

Untuk mengetahui kinerja suatu daerah, dalam rangka mengetahui kesiapan daerah tersebut dalam menghadapi otonomi daerah, maka digunakan 4 tolok ukur. Empat tolok ukur ini digunakan untuk menganalisis variabel penelitian. Variabel penelitian yang dianalisis meliputi :

1. Variabel penelitian untuk mengukur kemampuan keuangan dalam pembiayaan.
2. Variabel penelitian untuk mengukur kemampuan keuangan dalam mobilisasi daerah.
3. Variabel penelitian untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui rasio derajat otonomi fiskal/ *administrasi independency ratio*.
4. Variabel penelitian untuk mengukur tingkat kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, melalui rasio tingkat desentralisasi fiskal.

Variabel-variabel penelitian ini kemudian dianalisis dengan alat bantu statistik yang sesuai. Objek dari penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Barat yang meliputi kabupaten Pandegalang, kabupaten Lebak, kabupaten Bogor, kabupaten Sukabumi, kabupaten Cianjur, kabupaten Bandung,

kabupaten Garut, kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, kabupaten Kuningan, kabupaten Cirebon, kabupaten Majalengka, kabupaten Sumedang, kabupaten Indramayu, kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, kabupaten Karawang, kabupaten Bekasi, kabupaten Tangerang, kabupaten Serang, kotamadya Bogor, kotamadya Sukabumi, kotamadya Bandung, kotamadya Cirebon, kotamadya Tangerang, kotamadya Bekasi. Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota tersebut dikategorikan menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum *fiscal stress* dan periode saat *fiscal stress*. Periode sebelum *fiscal stress* diwakili oleh Realisasi tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1996/1997, sedangkan periode saat *fiscal stress* diwakili oleh tahun anggaran 1997/1998 dan 1999/2000.

Untuk membandingkan 2 periode tersebut maka digunakan alat bantu statistik berupa program SPSS 10.0. Metode statistik yang digunakan sebagai alat bantu analisis adalah menggunakan metode statistik nonparametrik dan parametrik. Uji statistik nonparametrik menggunakan metode uji Ranking bertanda Wilcoxon (*Wilcoxon Signed Rank Test*). Uji statistik parametrik menggunakan metode uji beda dua sampel yang berpasangan (*Paired Samples T Test*).

Data yang diperoleh berupa realisasi APBD pada masing-masing kabupaten/kotamadya kemudian diukur menggunakan tolak ukur variabel penelitian yang telah ditentukan. Hasil pengukuran variabel penelitian ada dalam keterangan lampiran 1.

4.2. PENGUJIAN HIPOTESIS

4.2.1. Prosedur Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini terdiri dari hipotesis alternatif (H_1) dan hipotesis null (H_0) yang dinyatakan sebagai berikut :

Hipotesis Null (H_0)

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota pada periode sebelum *fiscal stress* tidak berbeda dengan periode setelah *fiscal stress*.

Hipotesis Alternatif (H_1) :

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota pada periode sebelum *fiscal stress* berbeda dengan periode setelah *fiscal stress*.

Dari hipotesis diatas dirinci lagi menjadi beberapa hipotesis yang menyatakan perbedaan pada tiap-tiap variabel yang ada dalam penelitian.

Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

H_0 = "Kinerja keuangan suatu daerah dalam bentuk pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* tidak berbeda dengan saat *fiscal stress*"

H_1 = "Kinerja keuangan suatu daerah dalam bentuk pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat krisis *fiscal stress*"

2. Hipotesis 2

H₀ = "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* tidak berbeda dengan saat *fiscal stress*"

H₁ = "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*"

3. Hipotesis 3

H₀ = "Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* tidak berbeda dengan saat terjadinya *fiscal stress*".

H₁ = "Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadinya krisis *fiscal stress*".

4. Hipotesis 4

H₀ = " Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* tidak berbeda dengan saat terjadi krisis *fiscal stress*"

H₁ = " Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadi krisis *fiscal stress*"

4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.2.1. Pengujian Untuk Periode Dua Tahun

a. Analisis Normalitas Data

Analisis normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov Sminov*. Analisis normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, jika $\alpha > 5\%$ maka data terdistribusi secara normal, jika $\alpha < 5\%$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 4.1 merupakan hasil pengujian nonparametrik *Kolmogorov -Sminov*, dengan sample periode dua tahun sebelum *fiscal stress*

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Data Dengan Uji *Kolmogorov Sminov*
Untuk Periode Dua Tahun Sebelum *Fiscal Stress*

Variabel	N	Normal Parameters		Most Extreme Difference			Kolmogorov Sminov	Asym P. sign (2-tailed)
		Mean	Std.Deviasi	Absolute	Positive	Negative		
1.K.Pembiayaan	50	105,23	45,33	.154	.154	-.129	1,091	.185
2.K.Mobilis Daerh	50	19,63	12,30	.225	.225	-.120	1,588	.013
3.Drj Om Fiscal	50	24,07	12,33	.165	.165	-.108	1,164	.133
4.Tk Desntr Fiscal	50	23,77	11,82	.165	.165	-.103	1,164	.133

Tabel 4.2 merupakan hasil pengujian nonparametrik *Kolmogorov-Sminov* dengan sampel dua tahun saat *fiscal stress*

Tabel 4.2
 Hasil Uji Normalitas Data Dengan Uji *Kolmogorov Sminov*
 Untuk Periode Dua Tahun Saat *Fiscal Stress*

Variabel	N	Normal Parameters		Most Extreme Difference			Kolmogorov Sminov	Asym P. sign (2-tailed)
		Mean	Std.Deviasi	Absolute	Positive	Negative		
1.K.Pembiayaan	52	75.06	26.91	.147	.147	-.071	1.058	.213
2.K.Mobilis Daerah	52	34.86	18.25	.089	.089	-.054	.644	.802
3.Drj Otn Fiscal	52	20.75	11.64	.089	.089	-.086	.644	.801
4.Tk Desntr Fiscal	52	16.50	12.35	.153	.143	-.153	1.103	.175

Dengan asumsi tingkat signifikansi (α) 5% maka dengan melihat nilai probabilitas atau nilai Asymp Sig (2-tailed) maka dapat disimpulkan dalam tabel 4.3

Tabel 4.3
 Pengujian Distribusi Data Dengan $\alpha = 5\%$

Variabel	Asym Sign		Keputusan
	Sebelum	Saat	
1.K.Pembiayaan	.185	.213	Normal
2.K.Mobilisasi Daerah	.013	.802	Tak normal/normal
3.Drj Otn. Fiscal	.133	.801	Normal
4.Tk Desntr. Fiscal	.133	.175	Normal

Dalam tabel 4.3 dapat dilihat bila tidak semua data terdistribusi secara normal, sehingga perlu dilakukan uji pendamping. Uji pendamping yang digunakan adalah uji nonparametrik Wilcoxon Sign Rank Test.

b. Analisis *Paired Sample T Test*

Paired Sample T Test adalah uji beda dua sampel yang berpasangan, memiliki subjek sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Untuk menguji sampel sebelum dan saat *fiscal stress* apakah memiliki rata-rata tingkat kemandirian

pembiayaan, tingkat ketergantungan dan tingkat desentralisasi daerah berbeda secara signifikan atau tidak menggunakan uji T (*Paired Sample T Test*). Hasil pengujian T Test dengan periode dua tahun ditunjukkan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Hasil Uji t Untuk Dua Sampel Berpasangan ($\alpha = 5\%$)
Untuk Sampel 2 Tahun Sebelum dan Saat Fiscal Stress

Rasio	Periode	Uji t			Keputusan
		Mean	Sign	T Value	
1. K. Pembiayaan	Sebelum	105.23	.000	5.525	Signifikan
	Saat	72.89			
2. K. Mobilisasi Daerah	Sebelum	19.63	.000	-6.977	Signifikan
	Saat	34.56			
3. Dtg. Otn. Fiskal	Sebelum	24.06	.014	2.537	Signifikan
	Saat	20.20			
4. Tk. Desentr. Fiskal	Sebelum	23.77	.033	2.257	Signifikan
	Saat	16.18			

Dengan menggunakan uji parametrik yaitu uji t, dengan tingkat signifikansi (α) 5%, maka hasil pengujian untuk periode dua tahun sebelum dan dua tahun saat fiscal stress dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Dengan melihat signifikansi sebesar .000, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ maka terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan sebelum dan saat *fiscal stress*. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*" tidak ditolak karena t hitung $>$ t tabel ($5.525 > 1.671$). Kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota

lebih tinggi sebelum *fiscal stress* dibandingkan saat *fiscal stress*, hal ini bisa dilihat mean untuk ratio tingkat pembiayaan yang masing-masing menunjukkan 105,23 dan 72,89. Penurunan kemampuan tingkat kemandirian pembiayaan pada saat *fiscal stress*, diakibatkan oleh terbitnya UU No. 18 Tahun 1997, dimana undang-undang ini mengakibatkan penurunan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah karena terdapat beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang tidak diberlakukan lagi. Menurunnya jumlah pajak dan retribusi daerah menyebabkan jumlah Pendapatan Asli Daerah juga menurun sedangkan pada saat terjadi *fiscal stress* Belanja Rutin Non Pegawai tetap atau bahkan pada sektor-sektor yang mengalami dampak inflasi mengalami kenaikan, hal ini menyebabkan tingkat kemandirian pembiayaan mengalami penurunan. Sebagai contoh bisa dilihat pada kabupaten Pandeglang dari tahun 1995/1996 - 1999/2000 ratio yang ditunjukkan mengalami penurunan 82,14 ; 63,20 ; 68,45 ; 62,56; 35,55.

2. Tingkat signifikansi sebesar .000, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar .05, maka terdapat perbedaan kinerja secara signifikan sebelum dan saat *fiscal stress*. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja

keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*” diterima karena t hitung $>$ t tabel ($-6,977 > -1,671$). Kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota lebih rendah sebelum *fiscal stress* daripada saat *fiscal stress*, hal ini bisa dilihat dari nilai mean sebelum krisis sebesar 19,63 lebih kecil dari nilai mean saat krisis sebesar 34,56. Disini berarti pemerintah kabupaten/kota mampu meningkatkan mobilisasi daerahnya. Adanya UU No. 18 Tahun 1997 membawa pengaruh terhadap sektor pajak daerah tetapi mayoritas kabupaten/kota tetap mengalami peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dan peningkatan yang ditunjukkan dalam bentuk angka ratio tidak menunjukkan pertumbuhan yang mencolok. Hal ini juga bisa terjadi karena terdapat sektor-sektor yang berhubungan dengan pajak dimana sektor-sektor ini memiliki imbas positif dari krisis ekonomi, yang menyebabkan jumlah pajak yang diterima meningkat. Sektor yang berhubungan dengan pajak seperti pendapatan masyarakat ada yang mengalami kenaikan, dimana sumber pendapatan mereka memiliki dampak positif dari adanya krisis ekonomi. Dengan terjadinya krisis menyebabkan pendapatan mereka meningkat, sebagai contoh bagi para

eksportir dengan adanya krisis menyebabkan pendapatan mereka meningkat, karena pendapatan mereka dalam bentuk dolar, sedangkan rupiah sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi pada dolar.

3. Tingkat signifikansi sebesar 0.014 lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05 ,hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan daerah sebelum dan saat *fiscal stress*. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadinya *fiscal stress*” diterima, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,537 > 1,671$). Nilai mean sebesar 24,07 sebelum *fiscal stress* dan 20,20 pada saat *fiscal stress* menunjukkan bahwa pada saat *fiscal stress* ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin menurun. Disini pemerintah daerah pada saat sebelum *fiscal stress* ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tinggi, hal ini disebabkan karena adanya subsidi dari pemerintah yang menyebabkan daerah menggantungkan dana untuk pengeluaran pada subsidi dari pemerintah. Pada saat *fiscal stress* ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi menurun hal ini

disebabkan karena jumlah subsidi dari pemerintah dari pemerintah sudah tidak dapat mencukupi pengeluaran daerah, hal ini memaksa pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya.

4. Tingkat signifikansi sebesar 0,033 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum *fiscal stress* dan saat *fiscal stress*. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadi *fiscal stress*” diterima karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,257 > 1,671$). Tingkat desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal selama krisis ekonomi (*fiscal stress*) terjadi mengalami penurunan hal ini bisa dilihat pada nilai mean sebelum *fiscal stress* sebesar 23,77 dan nilai mean saat *fiscal stress* sebesar 16,18. Hal ini juga bisa dilihat pada lampiran I pada lampiran tersebut bisa dilihat dalam bentuk persentase bahwa tingkat desentralisasi fiskal saat terjadinya *fiscal stress* mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi dan terbitnya UU No 18 Tahun 1997,

sehingga berpengaruh terhadap total pendapatan daerah. Hal ini juga bisa disebabkan karena daerah kurang siap untuk menghadapi otonomi daerah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk meningkatkan PADnya akan mengalami kesulitan dalam mengelola daerahnya khususnya untuk membiayai pembangunan daerahnya. Daerah tidak bisa secara leluasa untuk mengelola daerahnya sesuai kemampuan dan tujuan pembangunan daerah.

c. Analisis Uji Ranking Bertanda *Wilcoxon*

Analisis uji ranking bertanda *Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test)* digunakan sebagai uji pendamping bagi uji T yang telah dilakukan. Uji pendamping ini digunakan untuk memperkuat hasil analisis dari uji T yang telah dilakukan. Pengujian normalitas data menggunakan uji nonparametrik *Kolmogorov Smirnov*, dimana data sebagian terdistribusi secara normal dan sebagian tidak terdistribusi secara normal, sehingga memerlukan uji pendamping *Wilcoxon Sign Rank Test* untuk memperkuat analisis yang telah dilakukan. Pada tabel 4.5 merupakan hasil pengujian menggunakan *Wilcoxon Sign Rank Test*

Tabel 4.5
Hasil Uji *Wilcoxon Sign Rank Test*
Untuk Sampel 2 Tahun Sebelum dan Saat *Fiscal Stress*

Rasio	Periode	Wilcoxon			Keputusan
		Mean	Sign	Z Value	
1. K. Pembiayaan	Sebelum	26,93	.000	-5,025	Signifikan
	Saat	16,71			
2. K. Mobilisasi Daerah	Sebelum	14,00	.000	-5,478	Signifikan
	Saat	26,78			
3. Drg. Otn. Fiskal	Sebelum	25,42	.007	-2,679	Signifikan
	Saat	25,71			
4. Tk. Desentr. Fiskal	Sebelum	25,75	.000	-4,783	Signifikan
	Saat	23,67			

Dengan menggunakan uji nonparametrik yaitu uji peringkat bertanda wilcoxon, dengan tingkat signifikansi (α) 5%, maka hasil pengujian untuk periode dua tahun sebelum dan dua tahun saat fiscal stress dapat dinyatakan sebagai berikut :

Dengan melihat pada tabel 4.5 nilai signifikansi pada masing-masing variabel penelitian yaitu tingkat pembiayaan sebesar .000, tingkat mobilisasi daerah .000, tingkat ketergantungan (*independency ratio*) .007, dan tingkat desentralisasi fiskal .000, dimana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 sehingga terdapat perbedaan kinerja sebelum dan saat *fiscal stress*. Hasil untuk pengujian hipotesis menggunakan *Wilcoxon Sign Rank Test* adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*" diterima karena Z hitung $>$ Z tabel ($-5,825 > 1,96$). Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan

pembiayaan sebelum *fiscal stress* dan saat *fiscal stress* Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test sebelumnya.

2. Hipotesis alternative yang menyatakan “Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*” diterima karena Z hitung $>$ Z tabel ($-5,478 > -1,96$). Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test sebelumnya, sehingga pengujian parametrik dan non parametrik memiliki hasil yang sama
3. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadinya *fiscal stress*” diterima , karena Z hitung $>$ Z tabel ($-2,679 > -1,96$). Hal ini berarti terdapat perbedaan antara tingkat ketergantungan pemerintah sebelum dan saat *fiscal stress*. Namun nilai mean disini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah lebih rendah sebelum *fiscal stress* daripada saat *fiscal stress*.
4. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadi *fiscal stress*” diterima, karena Z hitung $>$ Z tabel ($-4,783 > -1,96$), sehingga tingkat desentralisasi fiskal sebelum *fiscal stress* berbeda secara signifikan dengan saat terjadinya

saat *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test sebelumnya.

4.2.2.2 Pengujian Untuk Periode Satu Tahun

a. Analisis Normalitas Data

Analisis normalitas data digunakan untuk menguji normalitas data yang ada dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Normalitas data diperlukan untuk menentukan jenis pengujian yang akan dilakukan. Berikut adalah tabel hasil perhitungan normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov Sminov* dengan periode satu tahun sebelum *fiscal stress* dan satu tahun saat *fiscal stress*

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Data Dengan Uji *Kolmogorov Sminov*
Untuk Periode Satu Tahun Sebelum *Fiscal Stress*

Variabel	N	Normal Parameters		Most Extreme Difference			Kolmogorov Sminov	Asym P. sign (2-tailed)
		Mean	Std.Deviasi	Absolute	Positive	Negative		
1.K.Pembiayaan	25	98.17	34.57	.112	.112	-.100	.560	.912
2.K.Mobilis Daerh	25	19.46	12.64	.242	.242	-.112	1.21	.107
3.Drj Om Fiscal	25	23.96	11.65	.173	.173	-.121	.866	.441
4.Tk Desntr Fiscal	25	23.70	11.02	.172	.172	-.108	.862	.447

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Data Dengan Uji *Kolmogorov Sminov*
Untuk Periode Satu Tahun Saat *Fiscal Stress*

Variabel	N	Normal Parameters		Most Extreme Difference			Kolmogorov Sminov	Asym P. sign (2-tailed)
		Mean	Std.Deviasi	Absolute	Positive	Negative		
1.K.Pembiayaan	26	77.80	25.35	.165	.165	-.085	.839	.481
2.K.Mobilis Daerh	26	32.64	17.16	.090	.090	-.065	.460	.984
3.Drj Otn Fiscal	26	15.40	8.93	.196	.196	-.189	.997	.273
4.Tk Desntr Fiscal	26	17.64	13.28	.168	.159	-.168	.856	.456

Dengan asumsi tingkat signifikansi (α) 5% maka dengan melihat nilai probabilitas atau nilai Asymp. Sig (2-tailed) maka dapat disimpulkan dalam tabel 4.8

Tabel 4.8
Pengujian Distribusi Data Dengan $\alpha = 5\%$

Variabel	Asym Sign		Keputusan
	Sebelum	Saat	
1.K. Pembiayaan	.912	.481	Normal
2.K. Mobilisasi Daerah	.107	.984	Normal
3.Dj. Otn. Fiskal	.441	.273	Normal
4. Tk. Desentr. Fiskal	.447	.456	Normal

a. Analisis *Paired Sampel T Test*

Analisis paired sampel T test ini dilakukan untuk periode satu tahun sebelum dan satu tahun saat *fiscal stress*. Berikut ini perhitungan menggunakan uji T dengan periode satu tahun sebelum dan satu tahun saat *fiscal stress*.

Tabel 4.9
Hasil Uji t Untuk Dua Sampel Berpasangan ($\alpha = 5\%$)
Untuk Sampel 1 Tahun Sebelum dan Saat Fiscal Stress

Rasio	Periode	Uji t			Keputusan
		Mean	Sign	T Value	
1.K. Pembiayaan	Sebelum	98.17	.000	4.324	Signifikan
	Saat	76.20			
2.K. Mobilisasi Daerah	Sebelum	19.46	.000	-5.488	Signifikan
	Saat	31.79			
3. Dj. Otn. Fiskal	Sebelum	23.96	.000	8.932	Signifikan
	Saat	15.14			
4. Tk. Desentr. Fiskal	Sebelum	23.70	.033	2.257	Signifikan
	Saat	17.47			

Dalam tabel 4.9 masing-masing variabel penelitian menunjukkan tingkat signifikansi untuk tingkat pembiayaan sebesar .000, tingkat mobilisasi daerah

sebesar .000, derajat otonomi fiskal sebesar .000 dan tingkat desentralisasi fiskal sebesar .033, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05, sehingga bisa dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan daerah sebelum dan saat *fiscal stress*. Hasil pengujian terhadap hipotesis alternatif dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*" diterima karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4.324 > 1.711$), sehingga tingkat pembiayaan pemerintah daerah sebelum *fiscal stress* berbeda secara signifikan dengan tingkat pembiayaan saat *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test untuk periode dua tahun.
2. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*" diterima karena $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($-5.488 > -1.711$). Disini juga bisa dilihat dari nilai mean sebelum dan saat *fiscal stress* yang masing-masing menunjukkan 19.46 dan 31.79 nilai ini menunjukkan bahwa tingkat mobilisasi daerah sebelum *fiscal stress* lebih rendah daripada saat *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test untuk periode dua tahun.

3. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadinya saat *fiscal stress*” diterima karena t hitung $>$ t tabel ($8.932 > 1.711$), sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara derajat otonomi fiskal sebelum dan saat *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test untuk periode dua tahun.
4. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadi *fiscal stress*” diterima , karena t hitung $>$ t tabel ($2.257 > 1.711$), sehingga tingkat desentralisasi fiskal sebelum *fiscal stress* berbeda secara signifikan dengan derajat otonomi fiskal saat terjadinya *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test untuk periode dua tahun.

c. Uji Peringkat Bertanda *Wilcoxon (Wilcoxon Sign Rank Test)*

Wilcoxon sign rank test ini digunakan sebagai uji pendamping atas pengujian yang telah dilakukan, guna memperkuat analisis yang telah dihasilkan . Berikut hasil perhitungan menggunakan alat uji non parametrik *Wilcoxon sign rank test*:

Tabel 4.10
 Hasil Uji *Wilcoxon Sign Rank Test*
 Untuk Sampel 1 Tahun Sebelum dan Saat *Fiscal Stress*

Rasio	Periode	Wilcoxon			Keputusan
		Mean	Sign	Z Value	
1. K. Pembiayaan	Sebelum	14.05	.000	-3.565	Signifikan
	Saat	7.50			
2. K. Mobilisasi Daerah	Sebelum	6.00	.000	-4.211	Signifikan
	Saat	13.29			
3. Dj. On. Fiskal	Sebelum	13.50	.000	-4.345	Signifikan
	Saat	1.00			
4. Tk. Desent. Fiskal	Sebelum	12.50	.000	-3.700	Signifikan
	Saat	25.00			

Pada tabel 4.10 nilai signifikansi menunjukkan dibawah nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05, sehingga bisa disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan saat *fiscal stress*. Hasil untuk pengujian hipotesis menggunakan *Wilcoxon Sign Rank Test* adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan pembiayaan daerah pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*" diterima karena Z hitung $>$ Z tabel ($-3,565 > 1,96$). Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan pembiayaan sebelum *fiscal stress* dan saat *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test sebelumnya.
2. Hipotesis alternatif yang menyatakan "Kinerja keuangan dalam bentuk kemampuan mobilisasi daerah pemerintah kabupaten/kota

sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat *fiscal stress*” diterima karena Z hitung $>$ Z tabel ($-4,211 > -1,96$). Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test sebelumnya, sehingga pengujian parametrik dan non parametrik memiliki hasil yang sama

3. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadinya *fiscal stress*” diterima , karena Z hitung $>$ Z tabel ($-4,345 > -1,96$). Hal ini berarti terdapat perbedaan antara tingkat ketergantungan pemerintah sebelum dan saat *fiscal stress*. Namun nilai mean disini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah lebih rendah sebelum *fiscal stress* daripada saat *fiscal stress*.
4. Hipotesis alternatif yang menyatakan “Kinerja keuangan daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota sebelum *fiscal stress* berbeda dengan saat terjadi *fiscal stress*” diterima, karena Z hitung $>$ Z tabel ($-3,700 > -1,96$), sehingga tingkat desentralisasi fiskal sebelum *fiscal stress* berbeda secara signifikan dengan saat terjadinya saat *fiscal stress*. Pengujian ini konsisten dengan pengujian T Test sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan mengenai analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota untuk periode sebelum dan saat *fiscal stress* dengan objek penelitian kabupaten/kota yang ada di propinsi Jawa Barat. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. *Fiscal stress* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Kinerja keuangan daerah yang diukur dengan beberapa variabel menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah sebelum *fiscal stress* lebih baik daripada saat *fiscal stress*. Hal ini ditunjukkan dengan makin menurunnya kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan tingkat kemandirian pembiayaan, tingkat ketergantungan dan tingkat desentralisasi fiskal.
2. Pada analisis *Paired Sample T test* untuk periode anggaran 2 tahun sebelum dan saat *fiscal stress* menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan tersebut ditunjukkan dari nilai T hitung pada masing-masing variabel penelitian lebih besar dari nilai T tabel, nilai T masing-masing variabel penelitian yang meliputi kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi daerah, derajat otonomi fiskal dan tingkat

desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut 5,525, -6,977, 2,537, 2,257.

Perbedaan yang terjadi pada kinerja keuangan daerah meliputi:

- a. Kemampuan pembiayaan sebelum *fiscal stress* lebih tinggi daripada saat *fiscal stress*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerahnya kurang maksimal. Sehingga pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang.
- b. Kemampuan mobilisasi daerah lebih rendah sebelum *fiscal stress* daripada saat *fiscal stress*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota tetap dapat meningkatkan pendapatannya yang berasal dari pajak walaupun kenaikan yang terjadi tidak terlalu mencolok. Namun kenaikan pendapatan yang berasal dari pajak ini tidak terlalu berpengaruh pada kemampuan pembiayaan suatu daerah kabupaten/kota karena kenaikan jumlah belanja daerah lebih besar dari jumlah kenaikan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena inflasi yang cukup tinggi, dimana terdapat pengeluaran daerah dimana besarnya pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh inflasi. Kenaikan pendapatan lebih kecil dari kenaikan belanja daerah. Hal seperti ini menunjukkan ketidak stabilan kinerja pemerintah kabupaten/kota yang kemudian akan mempengaruhi kesiapan dalam menghadapi otonomi daerah.
- c. Derajat otonomi fiskal sebelum *fiscal stress* lebih rendah saat *fiscal stress* dibandingkan sebelum *fiscal stress*. Hal ini menunjukkan

c. Derajat otonomi fiskal sebelum *fiscal stress* lebih rendah saat *fiscal stress* dibandingkan sebelum *fiscal stress*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan suatu daerah kabupaten/kota pada saat ini masih sangat besar. Hal ini sangat menghambat suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah, dimana otonomi daerah dapat dilaksanakan apabila daerah tersebut sudah tidak tergantung secara berlebihan kepada pemerintah pusat.

d. Tingkat desentralisasi fiskal sebelum *fiscal stress* lebih tinggi dibandingkan saat *fiscal stress*. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa daerah belum bisa secara luas dalam mengelola daerahnya karena dalam otonomi daerah suatu daerah harus sudah dapat melaksanakan wewenangnya secara luas dan nyata untuk mengurus dan mengatur daerahnya.

Hasil pengujian menggunakan *Wilcoxon Sign Rank Test* untuk periode dua tahun dan satu tahun menunjukkan hasil yang sama yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum *fiscal stress* dan saat *fiscal stress*. Hasil pengujian menggunakan *T Test* untuk periode satu tahun juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum *fiscal stress* dan saat *fiscal stress*

3. Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas dapat diketahui bahwa *fiscal stress* yang disebabkan terjadinya krisis ekonomi yang melanda

Indonesia, dimana hal ini mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. *Fiscal stress* menyebabkan ketidakstabilan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota selama periode sebelum dan saat terjadinya *fiscal stress*.

Tidak stabilnya kinerja keuangan ini berpengaruh pada kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi otonomi daerah, dimana untuk menghadapi otonomi daerah suatu kabupaten/kota dituntut untuk lebih mandiri dalam kinerja keuangan pemerintahannya. Jika kinerja keuangan daerahnya tidak stabil maka akan mengganggu kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi otonomi daerah.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kinerja keuangan daerahnya karena hal ini merupakan tumpuan dalam menghadapi era otonomi daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali kemampuan daerahnya, seperti pemanfaatan sumberdaya alam yang ada dan peningkatan sumberdaya manusia untuk menunjang peningkatan keuangan daerah.
3. Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerahnya diharapkan pemerintah daerah menciptakan

4. Adanya *fiscal stress* menyebabkan adanya ketidak pastian anggaran, sehingga pemerintah daerah dalam menyusun penganggaran pembiayaan/pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan anggaran dalam jumlah yang cukup. Penganggaran pengeluaran dengan kepastian atas sumber pembiayaan daerah yang tersedia akan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan/ pengeluaran daerahnya. Lebih diperhitungkan lagi resiko yang akan diperoleh dari suatu pembiayaan/ pengeluaran.
5. Sektor-sektor perekonomian yang memiliki imbas positif dari krisis ekonomi diharapkan lebih diperhatikan dan dibina oleh pemerintah daerah sehingga akan memberikan sumbangan yang cukup pada penerimaan daerah.
6. Untuk pengeluaran daerah yang memiliki imbas negatif dari krisis ekonomi diharapkan dikelola lebih efisien dan efektif. Pertimbangan penganggaran pengeluaran yang dilakukan harus diperhatikan antara anggaran yang dikeluarkan apakah sesuai dengan kemampuan daerah, apakah pengeluaran tersebut sudah sesuai dengan manfaat yang diperoleh.
7. Pelaksanaan anggaran harus lebih diperketat untuk menghindari dari tindakan-tindakan yang merugikan keuangan daerah seperti korupsi.
8. Penghematan dan disiplin anggaran.
9. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan yang sama dengan memperluas sampel penelitian dan data penelitian , sehingga penelitian atas pengaruh fiscal stress terhadap kemampuan kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan hasil yang lebih baik.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal dibawah ini menyebabkan kelemahan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bersifat kasus sehingga sampel yang digunakan tidak semua propinsi yang ada di Indonesia, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berlaku bagi propinsi yang diteliti.
2. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini hanya menggunakan salah satu tolak ukur dari tolak ukur yang ada.
3. Data yang digunakan hanya 4 tahun anggaran yaitu 2 tahun sebelum *fiscal stress* dan 2 tahun saat *fiscal stress*.